

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Transparansi Anggaran dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Siak

Siska Eria Gea^{1*}, Indra Satriawan²

^{1,2} Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

* E-mail: siskaeria08@mail.com

Information Article

History Article

Submission: 18-08-2026

Revision: 30-09-2026

Published: 05-10-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i2.745

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berada di Kecamatan Mempura dan Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 39 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara /kaur keuangan desa. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial, sistem pengendalian intern, transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pemanfaatan Teknologi Informasi, Transparansi Anggaran, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the influence of internal control systems, the use of information technology, budget transparency, and community participation on the accountability of village fund management in Mempura and Siak Districts, Siak Regency. This study uses a quantitative method with data collection techniques through questionnaires distributed to 39 respondents consisting of village heads, village secretaries, and village treasurers/heads of households. The data analysis technique in this study uses multiple linear regression analysis with the help of SPSS software version 26. The results of the study show that simultaneously the internal control system, the use of information technology, budget transparency, and community participation have a positive and significant effect on the accountability of village fund management. Partially, the internal control system, budget transparency, and community participation have a positive and significant influence,

Acknowledgment

while the use of information technology does not show a significant influence on the accountability for village fund management.

Key word: *Technology, Budget Transparency, Community Participation*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Dana desa yang bersumber dari APBN dialokasikan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan dasar pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan kewenangan pengelolaan anggaran secara mandiri kepada pemerintah desa. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar penguat status daerah/desa sebagai lembaga pemerintahan dan diharapkan dapat memajukan masyarakat untuk bisa memberdayakan masyarakat didesa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ialah semua aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Problematika yang erat hubungannya dengan pengelolaan keuangan desa yaitu adanya tindak korupsi, penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Maka dalam mengelola keuangan desa, Pemerintah Desa diharapkan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, sesuai dengan sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sektor desa mendominasi kasus korupsi tingkat desa sepanjang 2023 dengan 187 kasus dan potensi kerugian negara sebesar Rp162,2 miliar melonjak dari 17 kasus pada 2016, atau peningkatan lebih dari sepuluh kali lipat dalam tujuh tahun. Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI, 2023) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 menemukan 9.261 dari 705 laporan pemeriksaan, dengan 7.006 permasalahan (44,6%) senilai Rp18,19 triliun. Terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Kelemahan SPI ini menjadi faktor utama tidak tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada sejumlah pemerintah daerah, termasuk yang terkait pengelolaan dana desa (BPK RI, 2023).

Pada tingkat implementasi, tantangan serupa terlihat pada pemanfaatan teknologi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai instrumen utama akuntabilitas keuangan desa. Implementasi SISKEUDES baru mencapai 95,06% hingga akhir 2019. Namun kualitasnya masih rendah, kesenjangan antara kemampuan teknis perangkat desa dan standar pelaporan yang diamanatkan masih terbuka lebar. BPKP mencatat sejumlah desa belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan belum memiliki prosedur administrasi yang tertib. Sebagian desa juga belum menyusun

laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku (BPK RI, 2023). Kondisi ini mempertegas bahwa kecepatan penyaluran dana tidak berbanding lurus dengan kualitas akuntabilitas.

Pada Kampung Teluk Merempan, Kecamatan Mempura. Dana BUMKam sebesar Rp135 juta yang seharusnya dikelola oleh pengurus BUMKam selaku pihak yang mengajukan proposal justru dicairkan dan dikelola secara langsung oleh penghulu tanpa disertai keterbukaan informasi belanja kepada masyarakat (RiauTime.com, 2026). Kasus ini secara bersamaan mencerminkan lemahnya transparansi anggaran dan rendahnya partisipasi pengawasan masyarakat.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat realitas maraknya kasus korupsi dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya, sementara upaya pencegahan melalui penguatan SPI, pemanfaatan TI, transparansi, dan partisipasi masyarakat belum menunjukkan hasil yang optimal secara nasional. Penelitian ini mendesak untuk dilakukan karena Kabupaten Siak, meskipun memiliki reputasi baik dalam tata kelola keuangan desa, tetap berpotensi menghadapi risiko penyimpangan jika faktor-faktor akuntabilitas tidak dikelola dengan baik. Lebih dari itu, temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Siak, Inspektorat Daerah, dan para pendamping desa dalam menyusun strategi penguatan yang tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono, (2023), penelitian kuantitatif adalah penelitian berbasis pada data numerik yang di analisis secara statistik untuk menguji hipotesis dan menjelaskan hubungan antar variabel. Karena penelitian ini bermaksud menggunakan data numerik untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas yaitu sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa, untuk itu pendekatan kuantitatif dipilih

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. lokasi Penelitian ini dilaksanakan di lingkup pemerintahan desa di kecamatan mempura dan kecamatan siak kabupaten siak, yang secara aktif terlibat dalam administrasi anggaran desa. Waktu penelitian direncanakan pada Januari hingga Juni 2026, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan Menurut (Sugiono, 2023).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung melalui penyampaian kuesioner kepada responden di lingkungan pemerintah desa di dua kecamatan yang berada di kecamatan yang berada di kabupaten

siak.

Alat analisis statistik yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda dengan program komputer *SPSS 26 for windows*. *Software* ini akan dipakai sebagai alat uji asumsi klasik maupun uji hipotesis data kuantitatif. Model regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen. Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah dengan teknik analisis data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Hipotesis

- H₁: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Siak.
- H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Siak.
- H₃: Transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Siak.
- H₄: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Siak.
- H₅: Sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Siak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	39	10	20	18.49	1.760
Sistem Pengendalian Intern (X1)	39	12	24	21.44	2.222
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	39	15	32	27.18	5.155
Tranparansi Anggaran (X3)	39	10	36	28.79	7.367
Partisipasi Masyarakat (X4)	39	8	20	18.44	2.174
Valid N (listwise)	39				

Sumber: Data Olahan SPSS 26 (2026)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif yang disajikan dalam tabel 4.3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem Pengendalian Intern (X_1)

Nilai Sistem Pengendalian Intern berkisar antara nilai minimum 12, nilai maximum 24, dengan mean sejumlah 21,44. Nilai standar deviasi sejumlah 2,222. Karena nilai rata-rata lebih tinggi dari standar deviasi, maka nilai rata-rata dan standar deviasi Sistem Pengendalian Intern memperlihatkan bahwasanya data terdistribusi dengan baik

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2)

Nilai Pemanfaatan Teknologi Informasi minimum 15, maximum 32, dengan (mean sejumlah 27,18 serta standar deviasi sejumlah 5.155. Karena nilai rata-rata lebih tinggi dari standar deviasi, maka Pemanfaatan Teknologi Informasi memperlihatkan bahwasanya sebaran datanya baik.

c. Transparansi Anggaran (X_3)

Nilai Transparansi Anggaran minimum 10, maximum 36 dengan mean sejumlah 28,79 dan standar deviasi sejumlah 7.367. Karena nilai mean lebih tinggi dari standar deviasi, maka nilai mean dan standar deviasi pada Transparansi Anggaran memperlihatkan bahwasanya data terdistribusi dengan baik.

d. Partisipasi Masyarakat (X_4)

Nilai Partisipasi Masyarakat minimum 8, maximum 20 dengan mean sejumlah 18,44 serta standar deviasi sejumlah 2.174. Karena nilai mean lebih tinggi dari standar deviasi, maka Partisipasi Masyarakat memperlihatkan bahwasanya sebaran datanya baik.

e. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa nilai minimum 10, niali maximum 20 dengan mean sejumlah 18,21 dan standar deviasi sejumlah 1,765. Nilai mean dan standar deviasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa memperlihatkan bahwasanya data terdistribusi dengan baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normaitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.107	39	.200*	.963	39	.223
*. This is a lower bound of the true significance.						
a. Lilliefors Significance Correction						

Sumber: Data Olahan SPSS 26 (2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik Shapiro-Wilk. Dapat dilihat pada tabel 2 hasil pengujian menunjukkan nialai Sig lebih besar dari 0,05 ($0,223 > 0,05$).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui uji statistik terbukti dan residual berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas

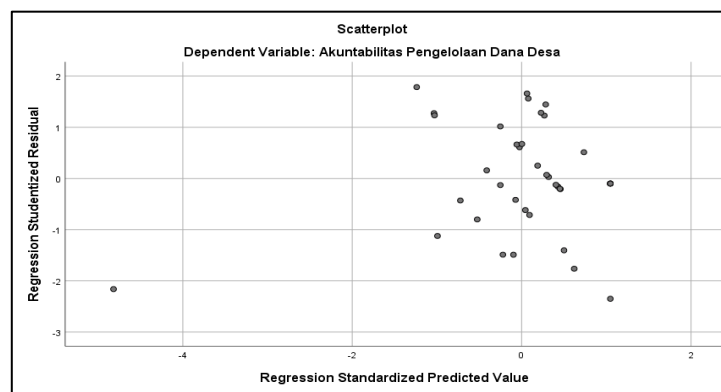
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.143	1.506		2.751	.009		
	X1	.246	.101	.310	2.429	.021	.443	2.258
	X2	-.044	.039	-.128	-1.124	.269	.555	1.801
	X3	.065	.026	.274	2.562	.015	.632	1.581
	X4	.455	.095	.562	4.810	.000	.530	1.888

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data Olahan SPSS 26 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diketahui pada perhitungan nilai *Tolerance* tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan yang sama ditunjukkan pada nilai VIF, dimana tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolonieritas pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)

Sumber: Data Olahan SPSS 26 (2026)

Dari grafik Scatterplots dalam gambar 1 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini.

Analisis Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.869 ^a	.755	.726	.92190

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Tranparansi Anggaran , Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern

Sumber: Data Olahan SPSS 26 (2026)

Berdasarkan pada tabel 4 diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,726 atau 72,6%. Artinya adalah menunjukkan bahwa ketika digabungkan variabel sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat sebagai variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen adalah 72,6% sedangkan sisanya 27,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Uji Signifikansi t (Uji Parsial)

Tabel 5. Hasil Signifikasi Uji Parsial (Uji-t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.143	1.506		2.751	.009
	X1	.246	.101	.310	2.429	.021
	X2	-.044	.039	-.128	-1.124	.269
	X3	.065	.026	.274	2.562	.015
	X4	.455	.095	.562	4.810	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS 26 (2026)

Berdasarkan pada tabel 5 hasil uji signifikansi t penjelasanya sebagai berikut: variabel independen yang mempunyai nilai sig lebih kecil dari 0,05. Secara parsial variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,021, variabel transparansi anggaran sebesar 0,015, variabel partisipasi masyarakat sebesar 0, 000. Sedangkan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0, 269 lebih besar dari nilai sig 0,05 artinya variabel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Mempura dan Kecamatan Siak.

Uji Signifikansi f (Uji Simultan)

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	88.847	4	22.212	26.134	.000 ^b
	Residual	28.897	34	.850		
	Total	117.744	38			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Tranparansi Anggaran , Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern

Sumber: Data Olahan SPSS 26 (2026)

Berdasarkan tabel 6 dari perhitungan hasil uji statistik F dapat ditunjukkan dari nilai sig lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai F-hitung sebesar 26,134 lebih besar dari F-tabel 2,65 Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen yaitu, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, transparansi anggaran, partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengeelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa di Kecamatan Mempura dan Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Ini sesuai dengan teori agensi (*Agency Theory*) yang di mana dalam menjelaskan agensi principal menuntut agen untuk dapat membuat pengendalian internal yang efektif dan efisien agar mendapatkan kualitas laporan keuangan desa yang terhindar dari segala bentuk kecurangan.

Hal ini juga diperkuat dengan penelitian Arfiansyah et al., (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Safelia, (2023) dalam penelitiannya di Kabupaten Batang Hari juga mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian Noviantoro, (2024) bahkan menempatkan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening yang memediasi hubungan antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga memperkuat posisi sistem pengendalian intern sebagai variabel kunci dalam ekosistem akuntabilitas keuangan desa.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal di wilayah Kecamatan mempura dan kecamatan siak dari keenam komponen penilaian sudah dijalankan dan diterapkan dengan cukup baik. Ketika sistem pengendalian internal dalam suatu wilayah telah dilaksa-

nakan dengan baik, maka akan berguna dalam menunjang fungsi pertanggungjawaban aparatur desa dan dapat meminimalisir adanya kecurangan dan penggelapan dana desa

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penelitian ini menyatakan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa di Kecamatan Mempura dan Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa teknologi informasi digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Selain itu, implementasi aplikasi SISKEUDEDES yang dikembangkan BPKP bersama Kemendagri ditujukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa. Oleh karena itu, meskipun belum berpengaruh signifikan pada penelitian ini, pemanfaatan teknologi informasi tetap merupakan amanat regulasi dalam mendukung pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini sejalan dengan Kusumawati, (2023) menjelaskan bahwa teknologi informasi menyediakan infrastruktur dan sumber belajar digital yang meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi proses kerja. Sesuai dengan penelitian Amelia et al., (2025) yang juga menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi organisasi apabila diikuti dengan kesiapan pengguna dan proses adaptasi yang memadai. Adapun hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marlon Reu et.al, 2021). Menurut BPKP, keuangan desa sangat besar, jumlah laporannya fluktuatif dan terdapat titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa yang juga membutuhkan tanggung jawab yang besar dari pemerintah desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ridwan et al., 2023).

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa pemanfaatan teknologi informasi bukanlah determinan tunggal yang secara otomatis meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, melainkan baru akan memberikan dampak signifikan apabila diiringi oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa.

Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hal ini berarti bahwa variabel transparansi anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa di Kecamatan Mempura dan Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Penelitian ini sejalan dengan teori agency dimana pemerintah desa yang ada di Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak telah menyediakan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan keuangan maupun non keuangan yang ditempel di papan pengumuman desa maupun di papan baliho atau spanduk. Permendagri Nomor

20 Tahun 2018 Pasal 2 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga hasil penelitian ini selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Semakin transparan pemerintah terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan pemerintahnya akuntabel. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Mawa, 2025) yang menjelaskan bahwa transparansi anggaran bukan hanya tentang penyediaan informasi, tetapi juga tentang kemampuan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan informasi tersebut guna memantau kinerja pemerintah desa. Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil ini membuktikan bahwa setiap peningkatan transparansi anggaran oleh pemerintah desa, meskipun dalam skala yang terbatas, tetap memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kedepannya efektivitas transparansi anggaran perlu didorong tidak hanya dari sisi penyediaan informasi oleh pemerintah desa, tetapi juga dari sisi penguatan literasi anggaran masyarakat agar siklus kontrol sosial atas pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih optimal.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pada variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa di Kecamatan Mempura dan Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui musyawarah desa, pengawasan, dan penyampaian aspirasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pahlawan et al., (2020), Al-Hanif et al., (2026), Huda, (2022), Ranti et al., (2023) Sabdosih et al., (2023) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Hasil yang sama juga ditemukan oleh Audia & Mulyani, (2023), yang membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di nagari kabupaten padang pariaman. diperkuat oleh penelitian oleh Al-Hanif et al., (2026) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, sehingga semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat pengelolaan keuangan desa yang dihasilkan. Selanjutnya, Ridwan et al., (2023) juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, diterimanya hipotesis keempat dalam penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu determinan paling kuat dalam mewujudkan akuntabilitas

pengelolaan dana desa di Kabupaten Siak. Hasil ini memperkuat bukti empiris dari berbagai penelitian terdahulu yang secara konsisten menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat, mampu menciptakan tekanan sosial yang efektif dalam mendorong aparatur desa untuk senantiasa bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola keuangan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis kelima ini menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemanfaatan Teknologi Informasi, Transparansi Anggaran dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa di Kecamatan Mempura dan Kecamatan Siak. Secara normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa saling melengkapi dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sinergi antara pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat merupakan implementasi nyata prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhivinna et.al, (2022) yang menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Adhivinna et.al, (2022) menjelaskan bahwa pengendalian internal yang baik, didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan keterlibatan masyarakat, dapat menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Indah et al., (2025) yang menyatakan bahwa Transparansi dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Mempura dan Kecamatan Siak tidak dapat hanya bertumpu pada satu faktor saja, melainkan memerlukan penguatan secara bersamaan pada sistem pengendalian intern, transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat sebagai faktor yang terbukti dominan, tanpa mengabaikan peran pemanfaatan teknologi informasi sebagai unsur pendukung dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang akuntabel.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap akuntabilitas pengelolaan dana

desa. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif tidak signifikan. Secara simultan keempat variabel berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintah desa diharapkan agar Pemerintah desa dapat meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hanif, F. M., Arza, F. I., & Putra, R. D. (2026). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Akuntansi Keuangan Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Empiris pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 8(1), 27–46. <https://doi.org/10.24036/jea.v8i1.3523>
- Amelia, S. I. M., & Mufid, A. I. (2025). *Pemanfaatan teknologi informasi digital dalam pengembangan pendidikan madrasah dan pesantren*. Edium: *Jurnal Pendidikan Madrasah dan Pesantren*, 3(1), 45–55. <https://doi.org/10.35905/edium.v3i1.11972>
- Arfiansyah, A., Tinggi, S., Islam, A., & Astuti, M. (2020). Journal of Islamic Finance and Accounting Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Audia, U. N., & Mulyani, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 691–706. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.680>
- BPK RI. (2023, December 5). *BPK Ungkap 9.261 Temuan Senilai RP18,19 Triliun pada Semester I Tahun 2023*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) - Situs Resmi [Www.Bpk.Go.Id](http://www.bpk.go.id).
- Indah, N., Lihawa, P., Noholo, S., Lukum, A., Artikel, R., Kunci, K., Transparansi, ., Masyarakat, P., Pengelolaan, A., & Desa, D. (2025). Pengaruh Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa INFO ARTIKEL. *Jambura Accounting Review Journal Homepage*, 6(1).
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Dikutip dalam Kompas.com (20 Mei 2024), "ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi".
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Berita Negara RI Tahun 2018 No. 611.
- Kusumawati, K. (2023). *Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan*. *Jurnal Limits*, 5(1), 7–14. <https://doi.org/10.59134/jlmt.v5i1.311>
- Marlon Reu, F., & Lasdi, L. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 38–59. <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.38-59>
- Ma'wa, J., & Ihsan, S. (2025). The Influence of Community Participation and Institutional Transparency on the Accountability of Village Financial Reports in Teaban Village, Suralaga District. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 9(2), 269–281. <https://doi.org/10.36555/jasa.v9i2.2832>
- Ning Sabdosih, W., & edy sarwono, A. (2023). Analisis Faktor Partisipasi Masyarakat, Kompetensi

Aparat Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* (Vol. 6, Number 2).

Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 5495

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 251, Tambahan Lembaran Negara No. 5952

RiauTime.com. (2026, 12 Februari). *Pengelolaan Dana BUMKam Teluk Merempan Disorot, Transparansi Dipertanyakan*. <https://www.riautime.com/news/detail/11050/pengelolaan-dana-bumkam-teluk-merempan-disorot-transparansi-dipertanyakan> yes

Ridwan, M., Santosa, R. E. W. A., Suharto, S., & Putri, A. P. R. Z. (2023). Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 92. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i1.1429>

Safelia, N. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 8(1), 74–87. <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i1.27507>

Sugiyono. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif*.

Tri Noviantoro, A. (2024). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal). *Journal of Economic, Business and Accounting*.

Vitta Adhivinna, V., & Damayanti, N. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2). <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>